BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi Asia, Juli 1997, yang ditandai dengan jatuhnya nilai mata uang menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kemunduran. Kehancuran terjadi pada sistem perbankan dan perubahan politik secara mendalam. Ketidakmampuan sektor swasta dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak debitur luar negeri, pada waktu itu banyak disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan, yang disebabkan karena lemahnya peraturan dan perundang-undangan yang mengatur sistem pengelolaan perusahaan Indonesia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di kalangan perusahaan di Indonesia. Hal ini terjadi karena sangat minimnya peraturan yang jelas akan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan kinerja perusahaan, seperti pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, serta pihak yang terkait dengan perusahaan (stakeholders) lainnya, sehingga pengawasan akan kinerja perusahaan menjadi sangat longgar.

Tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG tersebut tercermin dari kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis resiko atau hasil, investasi yang berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif, yang pada akhirnya menurunkan dan memudarakan kepercayaan pemodal. GCG bukanlah hal yang baru di Indonesia, dan saat ini tengah menjadi trend global serta menjadi keharusan di masa kini yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar dapat bersaing di pasar bebas yang semakin dekat waktunya.

Walaupun sudah berkembang menjadi istilah yang menjadi trend di berbagai kalangan, konsep GCG masih disalahartikan. Sebagian orang bahkan sering mengartikannya sebagai suatu konsep yang berhubungan dengan government (pemerintah). Pada hakikatnya, corporate governance adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana suatu korporasi untuk dioperasikan atau diawasi. Sistem ini mengatur dengan tegas dan jelas apa saja yang menjadi hak
dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan suatu korporasi bisnis, seperti dewan komisaris, dewan direksi, manajemen, pemegang saham dan para stakeholders lainnya, atau secara lebih khusus, *Good Corporate Governance* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*Stakeholders*) seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat. Penerapan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) akan menciptakan insentif internal yang efektif bagi manajemen perusahaan dan penggunaan sumber daya yang efisien, sehingga mendorong terbentuknya kepercayaan investor, dan masuknya arus modal yang mendorong pulihnya perekonomian, baik secara makro maupu secara mikro.

Laporan keuangan merupakan sarana utama bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan keadaan keuangan pada pihak luar perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Dalam menilai kinerja perusahaan, investor harus senantiasa berusaha untuk dapat menganalisis kemampuan keuangan perusahaan, untuk itu investor dapat memanfaatkan informasi yang tertera dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang penting untuk pengambilan keputusan ekonomi investor.

Permasalahan yang terkandung di dalam aspek pengelolaan keuangan perusahaan oleh manajemen adalah adanya masalah akuntabilitas kepada *stakeholders*. Akuntabilitas diperlukan untuk mengetahui pelaksanaan program-program manajemen, yang akan ditinjau dari aspek ketaatan pada peraturan efisiensi dan efektifitasnya. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan untuk terselenggaranya *Good Corporate Governance*. Sehubungan dengan pentingnya *corporate governance* seperti yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk
membuat penelitian mengenai masalah manfaat kualitas laporan keuangan di dalam menunjang tercapainya Good Corporate Governance.


Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti menuangkan skripsi ini dengan judul “Manfaat Kualitas Laporan Keuangan di Dalam Menunjang Tercapainya Good Corporate Governance.” (Studi kasus pada PT PINDAD (PERSERO) Bandung)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, Peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh PT PINDAD (PERSERO).
2. Bagaimana efektivitas Good Corporate Governance pada PT PINDAD (PERSERO).
3. Apakah kualitas laporan keuangan bermanfaat di dalam menunjang tercapainya Good Corporate Governance pada PT PINDAD (PERSERO).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan PT PINDAD (PERSERO).
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas *Good Corporate Governance* di PT PINDAD (PERSERO).

3. Untuk mengetahui apakah kualitas laporan keuangan memiliki manfaat dalam menunjang tercapainya *Good Corporate Governance* pada PT PINDAD (PERSERO).

1.4 **Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan serta pengetahuan tentang *Good Corporate Governance* yang selama ini peneliti peroleh dari artikel-artikel di majalah dengan kenyataan yang ada di dunia usaha Indonesia dan untuk mengetahui sejauh mana kualitas laporan keuangan mempengaruhi tercapainya *Good Corporate Governance* di Indonesia.

2. Bagi perusahaan

Untuk memberikan masukan dan diharapkan dapat membantu dalam penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan serta dalam peningkatan kualitas laporan keuangan perusahaan.

3. Bagi peneliti lain

Diharapkan dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk penelitian lain dengan topik yang sama atau yang berkaitan dengan topik ini dan membantu pemahaman mengenai *Good Corporate Governance*.

1.5 **Kerangka Pemikiran**

Laporan keuangan pada hakekatnya adalah gambaran keadaan keuangan pada suatu saat dan liputan hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan tujuan laporan keuangan seperti yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan dalam Bab Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 12 sebagai berikut:
“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.”

Manajemen perusahaan harus menyediakan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga informasi yang tersedia dalam laporan keuangan tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Agar laporan keuangan tersebut dapat berguna dalam menunjang peningkatan nilai perusahaan maka laporan keuangan tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu:

a. Dapat dipahami
   Informasi memiliki kualitas jika setiap informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai. Dalam hal ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan
   Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi periode masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Keandalan
   Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithfull representation) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.

d. Dapat diperbandingkan
   Pemakai harus memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai laporan keuangan juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk
mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Dalam situasi krisis ekonomi yang hingga kini belum berakhir, penerapan Good Corporate Governance menjadi suatu aspek vital dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Saat ini, banyak pihak mensyaratkan dijalankannya praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik dalam melakukan hubungan bisnis dengan mitra kerjanya, terlebih bagi para pemodal dan pemberi kredit.

Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang berperan dan terkait dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD),

“Good Corporate Governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Corporate Governance mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholders non-pemegang saham”

Sedangkan berdasarkan KEPMEN-117/2002 pasal 1 disebutkan bahwa pengertian Good Corporate Governance adalah

“Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan perundangan dan nilai-nilai etika.”

Berdasarkan pengertian Good Corporate Governance di atas pada prinsipnya memiliki kesamaan makna mengatur hubungan antara stakeholder yang berkepentingan dengan perusahaan yang diwujudkan suatu sistem pengendalian perusahaan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS, dan para stakeholders lainnya.
b. Suatu sistem check and balance mencakup kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat mewakili munculnya dua peluang pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan.

c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

Penerapan Good Corporate Governance dimaksudkan untuk menghindari sistem politik dan hak-hak, dan lebih mengacu kepada manajemen ekonomi suatu Negara, sumber-sumber sosial untuk pembangunan, dan kebutuhan untuk kerangka kerja aturan dan institusi yang dapat diperhitungkan dengan secara jelas. Adapun prinsip Good Corporate Governance berdasarkan KEPMEN-117/2002 adalah

1. Transparansi, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.


5. Pertanggungjawaban, adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ide pelaksanaan Good Corporate Governance di Indonesia merupakan dasar bagi perubahan budaya kerja pada perusahaan, dengan Good Corporate Governance diharapkan perusahaan dan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik yang sehat di segala bidang. Walaupun banyak pendapat tentang definisi dan tujuan Good Corporate Governance, namun demikian ada prinsip
dasar yang berlaku universal. Sebagai gambaran, untuk berhasil di pasar yang bersaing, suatu perusahaan harus mempunyai pengelola perusahaan yang inovatif, yang bersedia untuk mengambil resiko yang wajar, dan yang senantiasa yang mengembangkan strategi baru untuk mengantisipasi situasi yang berubah-ubah. Hal ini menuntut manajemen sebagai pengurus perusahaan mempunyai ruang gerak untuk bertindak bebas dan didorong untuk bertindak untuk kepentingan investor.

Mengingat bahwa akhir-akhir ini Good Corporate Governance merupakan salah satu pembahasan sehubungan dengan semakin besarnya publikasi tentang kecurangan maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan tanda tentang kecukupan Good Corporate Governance. Pelaksanaan Good Corporate Governance yang efektif menciptakan sistem pengendalian perusahaan, sehingga dapat menekan seminimal mungkin peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang masing-masing organ perusahaan.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa penerapan Good Corporate Governance pada BUMN bertujuan untuk:

a) Memaksimalikan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

b) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien serta meneberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;

c) Mendorong agar organ dalam pembuatan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;

d) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional

e) Mensuskeskan program privatisasi.
Hal-hal di atas telah meneguhkan pemikiran dan keyakinan BUMN mutlak memiliki suatu perspektif atau tujuan jangka panjang untuk membawa kemakmuran bagi stakeholder-nya. Hal tersebut harus tercakup dalam visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan dan pelaksanaanya berada dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola perusahaan dengan baik bukan hanya menjadi tanggung jawab direksi dan jajaran manajemen, tetapi juga diperlukan dukungan dan kerja sama dari komisaris dan pemegang saham maupun stakeholders lainnya seperti pekerja, pelanggan, mitra kerja dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disajikan bagan kerangka pemikiran
Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pemikiran

Kualitas Laporan Keuangan

Komponen :
1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keandalan
4. Dapat dibandingkan

Good Corporate Governance

Komponen :
1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kemandirian
4. Kewajaran
5. Pertanggungjawaban

Hipotesis :
Kualitas Laporan Keuangan Bermanfaat Di Dalam Menunjang Tercapainya Good Corporate Governance
1.6 Metodologi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

Menurut Mohammad Nazir (2003:63) mengartikan metode deskriptif adalah sebagai berikut:

“Merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu penelitian ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perusahaan khususnya mengenai aspek-aspek yang sedang diteliti dan melakukan terhadap variabel yang diteliti.”

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Teknik ini dilakukan baik secara Library Research maupun internet research, untuk memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, literatur, skripsi-skripsi di perpustakaan, internet, dan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data teoritis. Dari langkah ini penyusun memperoleh gambaran mengenai Good Corporate Governance, termasuk manfaat kualitas laporan keuangan di dalam menunjang tercapainya Good Corporate Governance.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke perusahaan dengan cara:

a. Observasi langsung, yaitu pengumpulan data yang diperlukan dari perusahaan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, terutama pada bagian Satuan Pengawas Internal.

b. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pimpinan dan staf yang terkait pada bagian Satuan Pengawas Internal.
c. **Kuesioner**, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan kepada pihak-pihak terkait dari perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam kuesioner Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

1.7 **Lokasi dan Waktu Penelitian**

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang sangat dibutuhkan bagi dunia bisnis dan ekonomi, khususnya dalam pengambilan keputusan. Adapun laporan keuangan itu sendiri didefinisikan oleh Kieso dan Weygrandt (2007:2) sebagai berikut:

“Financial statement are principal means through which financial information communicated to those outside on enterprise. These statements provides there firms history quantified in money terms.”

Kamus akuntansi (2005:225) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan baik di dalam maupun di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil perusahaan.”

Sedangkan Harahap (2002:7) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi.”

Sementara itu APB mendefinisikan laporan keuangan (2002:117) sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah suatu alat dengan mana informasi dikumpulkan dan diproses dalam akuntansi keuangan yang akhirnya dimasukkan dalam laporan keuangan yang dikomunikasikan secara periodik kepada para pemakainya.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan itu adalah informasi yang dikomunikasikan kepada pihak luar perusahaan yang memuat laporan masa lalu perusahaan yang diwujudkan dalam nilai uang serta merupakan hasil dari proses akuntansi.
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan pada PSAK No 1 paragraf 5 menyatakan:

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber daya yang diperdayakan kepada mereka.”

Sedangkan *APB Statement No.4* (AICPA) yang dikutip oleh Harahap (2002:17) membagi tujuan laporan keuangan menjadi dua yaitu, sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

   Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima.

2. Tujuan Khusus

   Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan.
Tujuan Laporan Keuangan APB Nomor 4

Tujuan khusus
Menyajikan Laporan:
- Posisi keuangan
- Hasil usaha
- Perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai GAAP

Tujuan umum
Memberikan informasi
- Sumber ekonomi
- Kewajiban
- Kekayaan bersih
- Proyeksi laba
- Perubahan harta dan kewajiban

Tujuan kualitatif
1. Relevance
2. Understandability
3. Verifiability
4. Neutrality
5. Timeliness
6. Comparability
7. Completeness

**Trueblood Committee**, seperti yang dikutip **Harahap (2002)** merumuskan tujuan laporan keuangan, sebagai berikut:

“**Memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.**”

Berbagai pendapat mengenai tujuan laporan keuangan ini pada hakikatnya adalah sama, yaitu untuk memberi informasi mengenai keadaan finansial perusahaan kepada pihak luar perusahaan agar dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Mengingat pentingnya laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, penyajiannya diharapkan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, agar pengguna laporan keuangan dapat memanfaatkannya secara tepat.
2.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan Bab Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Andal
4. Dapat diperbandingkan

Sedangkan American Institute of Certified Public Accountant melalui Accounting Principles Board (APB) Statement No.4 berpendapat bahwa akuntansi keuangan memiliki tujuh kualitas laporan keuangan, yaitu

1. Relevance
2. Understandability
3. Verifiability
4. Neutrality
5. Timeliness
6. Comparability
7. Completeness

2.1.3.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Berdasarkan SAK

2.1.3.1.1 Dapat Dipahami (Understandability)

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai disumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi yang kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.
2.1.3.1.2 Relevan (Relevance)


Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian resiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakikat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Informasi dipandang material, kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai demgan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Karena materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang dimiliki agar informasi dipandang berguna.
2.1.3.1.3 Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyatukan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari resiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyatukan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasikan transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti sehingga perusahaan pada umumnya tidak mengakuinya dalam laporan keuangan.

Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dari apa yang tampak dari bentuk hukum.
Netralitas (Neutrality)

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung ada kebutuhan dan keinginan tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

Kelengkapan (Completeness)

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

2.1.3.1.4 Dapat Dibandingkan (Comparability)

Berdasar Standar Akuntansi Keuangan Bab Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus dapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi
keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

2.1.3.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Berdasarkan APB

2.1.3.2.1 Relevance

Informasi keuangan yang relevan akan menunjang keputusan ekonomi dimana dia digunakan. Kualitas informasi yang relevan membantu memilih metode pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan yang paling mungkin membantu pembaca laporan dalam mengambil keputusan ini dengan menggunakan data akuntansi. Dalam menilai relevansi informasi keuangan yang bersifat *general purpose* perhatian harus difokuskan pada kebutuhan pembaca umum bukan pada kebutuhan pembaca khusus. Tugas penting adalah menentukan kebutuhan umum itu dan informasi yang relevan bagi mereka. Relevan adalah kualitas yang paling utama sebab informasi yang tidak menunjang pada keputusan dimana digunakan akan sia-sia tanpa memperhatikan sebatas mana ia dapat memenuhi kualitas lainnya.

2.1.3.2.2 Understandability

*Understandability* atau dapat dipahami artinya informasi akuntansi keuangan yang dapat dimengerti menyajikan data yang dapat dipahami oleh pembaca laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pemahaman pemakai. *Understandability* penting karena informasi akuntansi harus dapat dipahami jika ia digunakan. Pemakai laporan dapat memahami informasi hanya jika data yang disajikan dan metode penyajianya berarti bagi mereka. *Understandability* juga memerlukan agar pemakai memiliki pengertian terhadap kegiatan ekonomi dari perusahaan yang demikian kompleks, proses akuntansi keuangan, dan istilah yang digunakan dalam laporan keuangan.
2.1.3.2.3 Verifiability.

Informasi keuangan yang dapat diperiksa memberikan hasil bahwa akan diperoleh kesimpulan yang sama dalam menilai informasi jika digunakan metode pengukuran yang sama. Pengukuran tidak dapat bebas dari pendapat subjektif dan pertimbangan lainnya. Proses pengukuran dan penyajian informasi harus menggunakan tenaga manusia dan pikiran manusia. Dan oleh karenanya tidak dapat diserahkan begitu saja pada realitas objektif. Namun demikian kegunaan informasi akan lebih besar jika informasi dapat diperiksa, yaitu jika atribut yang dipilih untuk pengukuran dan dan metode pengukuran yang digunakan memberikan hasil bahwa laporan itu dapat didukung oleh ukuran yang independen.

2.1.3.2.4 Neutrality

Informasi akuntansi keuangan yang netral diarahkan pada kebutuhan umum dari pemakai dan bebas dari praduga tentang kebutuhan informasi tertentu dari pembaca tertentu. Pengukuran tidak didasarkan pada praduga tentang kebutuhan tertentu dari pemakai khusus yang meningkatkan relevansi informasi untuk kebutuhan umum dari pemakai. Penyaji informasi akuntansi keuangan jangan sekali-kali mencoba membandingkan pembaca tertentu dengan merugikan pihak lain yang memiliki kebutuhan yang bertentangan.

2.1.3.2.5 Timeliness

Informasi akuntansi keuangan yang tepat waktu berarti informasi itu disampaikan secepat mungkin untuk digunakan dalam pengambilan keputusan yang mungkin akan mempengaruhi dan menghindari penundaan dalam membuat keputusan.

2.1.3.2.6 Comparability

Comparability dari informasi keuangan umumnya tergantung pada kejadian yang sama yang dicatat dengan metode yang sama. Informasi akuntansi keuangan yang dapat diperbandingkan membantu kesimpulan yang berkaitan
dengan kekuatan, kelemahan, dan keberhasilannya, baik di antara beberapa periode dari satu perusahaan dan atau antara dua atau lebih perusahaan.

*Comparability* berarti kemampuan untuk membawa secara bersama tujuan mencatat poin-poin yang sama dan yang berbeda. *Comparability* dari informasi keuangan umumnya tergantung pada kejadian yang sama yang dicatat dengan metode yang sama. Informasi akuntansi keuangan yang dapat diperbandingkan membantu kesimpulan yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, dan keberhasilannya, baik di antara beberapa periode dari satu perusahaan dan atau antara dua atau lebih perusahaan.

**Konsistensi**

Konsistensi adalah faktor terpenting dalam perbandingan yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Walaupun praktek dan prosedur akuntansi keuangan umumnya konvensional, konsistensi dalam penggunaan membolehkan perbedaan perbandingan untuk beberapa waktu. Jika suatu perubahan praktek atau prosedur dilakukan, maka pengungkapan perubahan dan pengaruhnya harus dibatasi agar dapat dilakukan perbandingan, kendatipun pemakai laporan jarang membuat penyesuaian yang membuat data dapat diperbandingkan.

**Periode Pelaporan Yang Reguler**

Periode pelaporan yang reguler juga merupakan faktor penting dalam *comparability* dalam suatu perusahaan. Periode yang sama akan membantu perbandingan antar periode. Membandingkan hasil dari periode yang lebih pendek dari setahun,kendatipun periodenya sama, dalam memperbandingkan kita perlu memperhatikan faktor dan pengaruh musim.

2.1.3.2.7 *Completeness*

Informasi akuntansi keuangan yang lengkap mencakup semua data akuntansi keuangan yang secara rasional memenuhi persyaratan dari kualitas lainnya.
2.1.3.3 Hasil Perbandingan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Antara SAK Dengan APB

Berdasarkan pemaparan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut SAK dan APB diatas, bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut SAK terdiri atas dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan, sedangkan menurut APB terdiri atas relevance, understandability, verifiability, neutrality, timeliness, comparability dan completeness. Sehingga berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan, walaupun dari segi jumlah terdapat perbedaan.

Walaupun karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut APB lebih banyak bila dibandingkan dengan SAK, tetapi semua karakteristik tersebut sudah terakomodir di dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut SAK.

2.1.4 Pemakai Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan bab Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi:

a) Investor

Penanam modal beresiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

b) Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik
dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

c) **Pemberi Pinjaman**

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman beserta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

d) **Pemasok dan Kreditor**

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

e) **Pelanggan**

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

f) **Pemerintah**

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

g) **Masyarakat**

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.
2.1.5 Penyajian dan Komponen Laporan Keuangan

PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan merumuskan bahwa suatu laporan keuangan menyajikan informasi perusahaan yang meliputi:

a. Aktiva;
b. Kewajiban;
c. Ekuitas;
d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
e. Arus kas.

Adapun komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Neraca

A. Pengertian

Neraca didefinisikan oleh Harahap (2002:69) sebagai berikut:

“Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu tanggal tertentu atau a moment of time.”

Kamus akuntansi (2005:237) mendefinisikan neraca sebagai berikut:

“Neraca adalah suatu laporan keuangan yang dapat memberi informasi tentang sumber-sumber daya yang telah diperoleh perusahaan dan dari mana memperolehnya.”

Sedangkan Kieso and Weygrandt (2007:170) mendefinisikan neraca sebagai berikut:

“The balance sheet, sometimes referred to as the statement of financial position, reports the assets, liabilities, stockholders equity of a business enterprise at the specific date.”

B. Komponen Neraca

Neraca menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan modal pada saat tertentu. Laporan ini bisa disusun setiap saat dan merupakan opname situasi posisi keuangan pada saat itu, sedangkan komponen dari neraca itu sendiri adalah
1) **Asset** (Harta, Aktiva)

*Asset* adalah harta yang dimiliki perusahaan yang berperan dalam operasi perusahaan misalnya kas, persediaan, aktiva tetap, aktiva yang tidak berwujud, dan lain-lain. Aktiva ini lazimnya di Indonesia dan Amerika ditempatkan di sebelah kiri, sedangkan di beberapa negara di Eropa lazimnya ditempatkan di sebelah kanan. Pengertian *asset* secara teoritis didenisikan oleh FASB sebagai berikut:

“*Asset* adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu.”

Dari definisi di atas dapat dikenal bahwa suatu dianggap sebagai *asset* jika di masa yang akan datang dapat diharapkan memberikan net cash inflow yang positif kepada perusahaan.

2) **Liabilities** (Kewajiban/Utang)

APB mendenisikan kewajiban atau *liabilities* sebagai berikut:

“Kewajiban ekonomis dari suatu perusahaan yang diakui dan dinilai sesuai prinsip akuntansi. Kewajiban di sini termasuk juga saldo kredit yang ditunda yang bukan merupakan utang atau kewajiban.”

Pengertian kewajiban menurut APB ini menyangkut kewajiban ekonomis yang diartikan sebagai penyerahan harta atau jasa di masa yang akan datang.

FASB memberikan defenisian kewajiban sebagai berikut:

“...kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis di masa yang akan datang yang timbul akibat kewajiban perusahaan sekarang untuk memberikan harta atau memberikan jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang sebagai akibat suatu transaksi atau kejadian yang sudah terjadi.”

Di dalam kewajiban terdapat beberapa istilah penting diantaranya:

a. *Contractual liabilities*, adalah merupakan kewajiban yang didukung perjanjian tertulis.

b. *Constructive obligation*, adalah kewajiban yang tidak dinyatakan secara tertulis, misalnya pembayaran cuti atau bonus tertentu.

d. **Contingent liabilities**, adalah suatu situasi atau keadaan yang mengandung ketidakpastian atau apakah mungkin menimbulkan keuntungan atau kerugian kepada perusahaan yang hanya dapat dipastikan apabila suatu kejadian atau beberapa kejadian di masa yang akan datang terjadi atau tidak.

e. **Deferred credit**, adalah sejenis kewajiban tetapi bukan dalam pengertian memberikan pengorbanan di masa yang akan datang. *Deferred credits* ini ada dua jenis yaitu *prepaid revenue* (penerimaan *fee* di muka yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pemberian jasa atau produk yang dibayar) dan *Deferred* akibat peraturan pengekuan pendapatan, misalnya adalah investment tax credit dan laba rugi dari transaksi *leaseback*.

f. **Executory contract**, adalah perjanjian yang belum dilaksanakan tetapi kita sudah terikat dengan perjanjian baik untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang maupun akan menerima kekayaan atau jasa di masa yang akan datang.

3) **Modal Pemilik (Owner’s Equity)**

C. Bentuk Penyajian Neraca

Neraca biasanya disajikan berdasarkan likuiditas perkiraannya. Biasanya perkiraan yang paling lancar dan paling dekat dengan konversi kas dicatat paling atas. Kewajiban yang paling cepat harus dibayar harus dicantumkan paling atas dalam kelompoknya. Modal yang harus ditunaikan terlebih dahulu harus ditempatkan di atas. Dalam menyajikan neraca data dibagi dalam tiga bentuk:


b. Bentuk Kedua Neraca Skontro atau Account Form, neraca disajikan dengan aktiva ada di sebelah kiri dan kewajiban serta modal ditempatkan di sebelah kanan sehingga penyajiannya menyebelah.

c. Bentuk yang menyajikan posisi keuangan (Financial position Form), dalam bentuk ini posisi keuangan tidak dilaporkan seperti dalam bentuk sebelumnya yang berpedoman pada persamaan akuntansi. Dalam bentuk ini pertama-tama dicantumkan aktiva lancar dikurangi utang lancar dan pengurangannya diketahui modal kerja. Modal kerja ditambah aktiva tetap dan aktiva lainnya kemudian dikurangi dengan utang jangka panjang, maka akan diperoleh modal pemilik.

2. Laporan Laba Rugi
A. Pengertian

Laporan laba rugi didefinisikan Harahap (2002:57) sebagai berikut:

“Laporan laba rugi melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil, dan laba (rugi) perusahaan selama suatu periode tertentu.”

Kamus akuntansi (2005:81) mendefinisikan laporan laba rugi sebagai berikut:

“Laporan laba rugi adalah ikhtisar pendapatan dan biaya suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu.”

Sedangkan Kieso and Weygrandt (2007:126) mendefinisikannya sebagai:
“The income Statements, often called the statements of income or statement of earnings, is the report that measures the success of enterprise operations for a given period of time.”

B. Komponen Laporan Laba Rugi

1. Revenue (Pendapatan)

   Committee on Terminology mendefinisikan revenue sebagai hasil dari penjualan barang atau pemberian jasa yang dibebankan kepada langganan, atau mereka yang menerima jasa. Definisi ini menggunakan pendekatan revenue expense.

   APB mendefinisikan sebagai kenaikan gross di dalam asset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba. Definisi ini seolah-olah merupakan pendekatan revenue expense tetapi dari kalimat sesuai dengan prinsip akuntansi, maka jelas ini menunjukkan pendekatan asset liability.

   Kemudian FASB memberikan revenue sebagai arus masuk atau peningkatan nilai asset dari suatu entity atau penyelesaian kewajiban dari entity atau gabungan keduaanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan/produksi barang, pemberian jasa atas pelaksana kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan. Definisi ini jelas menggambarkan pendekatan asset liability.

2. Expense (Biaya)

   Biaya menurut Committee on Terminology adalah semua biaya yang telah dikenakan dan dapat dikurangkan pada penghasilan. Sedangkan APB mendefinisikan sebagai penurunan gross dalam asset atau kenaikan gross dalam kewajiban yang diakui dian dinilai menurut prinsip akuntansi yang diterima yang berasal dari kegiatan mencari laba yang dilakukan perusahaan.

   FASB mendefinisikan Expense sebagai arus keluar aktiva, penggunaan aktiva atau munculnya kewajiban atau kombinasi keduaanya selama suatu periode yang disebabkan oleh pengiriman barang, pembuatan barang, pembebanan jasa, atau kegiatan pelaksanaan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan.
Biaya biasanya dibagi dalam tiga golongan:
1. Biaya yang dihubungkan dengan penghasilan pada periode itu.
2. Biaya yang dihubungkan dengan periode tertentu yang tidak dikaitkan dengan penghasilan.
3. Biaya yang karena alasan praktis tidak dapat dikaitkan dengan periode mana pun.

Laba Rugi Insidentil
a. \textit{Gains} (laba/keuntungan dari transaksi tertentu yang sifatnya insidentil)

Di luar laba di atas ada penggolongan laba di luar laba tersebut yaitu yang dikenal dengan istilah gains. FASB mendefinisikan \textit{Gains} adalah naiknya nilai \textit{equity} dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama \textit{entity} dan dari transaksi/kejadian lainnya yang mempengaruhi \textit{entity} selama satu periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik.

b. \textit{Losses} (Rugi dari transaksi tertentu yang sifatnya insidentil)

\textit{Losses} adalah turunnya nilai \textit{equity} dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama \textit{entity} dan dari hasil seluruh transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi \textit{entity} selama periode tertentu kecuali yang berasal dari biaya atau pemberian dari pemilik (prive)

C. \textbf{Bentuk Penyajian Laba Rugi}

a. \textit{All inclusive dan Normal Operating}

Dalam menyajikan laporan laba rugi dikenal:
1. \textit{Current Operating Income}
2. \textit{All Inclusive Income}

Perbedaan ini timbul akibat perbedaan pendapat mengenai apakah suatu pos disajikan dalam laporan laba rugi. Ada yang berpendapat bahwa yang dicantumkan dalam laporan laba rugi hanyalah pendapatan yang berasal dari kegiatan normal (\textit{normal operating income}) sedangkan pos yang berasal dari kegiatan yang tidak biasa dicantumkan dalam laporan laba ditahan. Sehingga laba di \textit{bottom line} adalah laba normal. Konsep ini menganggap bahwa dalam menilai prestasi manajemen yang dinilai hanyalah prestasi yang berasal dari kegiatan
normal tidak termasuk kegiatan insidentil dan angka inilah yang lebih tepat dalam membuat prediksi kemampuan perusahaan mendapatkan laba di masa yang akan datang.

Sebaliknya jika semua income yang berasal dari kegiatan normal dan kegiatan insidentil dicantumkan dalam laporan laba rugi dan hasil akhirnya saja yang dilaporkan ke laporan laba ditahuan maka konsep ini disebut all inclusive income.

b. Single Step dan Multiple Step

Dalam menyajikan laporan laba rugi dengan metode single step semua pos hasil, baik yang normal maupun yang tidak normal baik yang operasi maupun non-operasi digabung dan demikian juga mengenai biaya kemudian baru keduanya dikurangkan sehingga hanya dalam satu langkah (single step) kita dapat mengetahui laba.

Dalam bentuk multiple step laba rugi baru diketahui setelah beberapa kali tahap pengurangan (multiple step), mulai dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan yang menghasilkan laba kotor, dikurangi biaya operasi menghasilkan laba operasi dan seterusnya sampai menghasilkan laba bersih. Dalam bentuk ini kita memang dapat menyajikan beberapa informasi yang kadang diperlukan oleh pemakai misalnya, laba kotor, laba operasi, dan sebagainya.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

A. Pengertian

Laporan ekuitas pemilik melaporkan perubahan ekuitas selama jangka waktu tertentu. Laporan ini disiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. Demikian juga laporan ini dibuat sebelum mempersiapkan neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca. Oleh karena itu laporan perubahan ekuitas seringkali dipandang sebagai penghubung antara laporan laba rugi dengan neraca.
Laporan perubahan ekuitas didefinisikan oleh Kieso dan Weygrandt (2007:78) sebagai berikut:

“Statement of stockholders equity reports the changes in each stockholders equity account and in total stockholders equity during a year”

Sedangkan menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2007:20) mendefinisikan laporan perubahan ekuitas sebagai berikut:

“The statement of shareholder’s equity report changes in the accounts that make up equity. This statement is useful in identifying reasons for changes in equity holders claims on the assets of a company.”

Di dalam kamus akuntansi (2005:226) menyebutkan bahwa

“Laporan perubahan ekuitas adalah ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama jangka waktu tertentu.”

B. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas


4. Laporan Arus Kas

A. Pengertian

Laporan arus kas merupakan akomodasi dari kelemahan laporan neraca dan laporan laba rugi. Laporan ini dinilai banyak memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan likuiditas di masa yang akan datang. Laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada suatu periode
tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, pembiayaan, dan investasi.

Laporan arus kas didefinisikan oleh Harahap sebagai berikut:

“Laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, pembiayaan dan investasi.”

Kamus akuntansi (2005:225) menyebutkan bahwa laporan arus kas adalah sebagai berikut:

“Laporan arus kas adalah laporan akuntansi yang mengikhtisarkan sumber dan penggunaan kas.”

Sedangkan Kieso dan Weygrandt mendefinisikan laporan arus kas dalam bukunya Intermediate Accounting (2007:190) sebagai berikut:

“The primary purpose of statement of cash flow is to provide relevant information about the cash receipt and cash payments of an enterprise during a period.”

B. Manfaat Laporan Arus Kas

Laporan arus kas ini dapat digunakan untuk:

a. Menilai kemampuan perusahaan menghasilkan, merencanakan, mengontrol arus kas masuk dan arus keluar perusahaan pada masa lalu.

b. Menilai kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih perusahaan, termasuk kemampuan membayar dividen.

c. Menyajikan informasi bagi investor, kreditur, memproyeksikan return dari sumber kekayaan perusahaan.

d. Menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang.

e. Menilai alasan perbedaan antara laba bersih dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.

f. Menilai pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu.
C. **Penentuan dan Penggolongan Arus Kas**

Untuk menentukan mana arus kas yang masuk ke tiga golongan operasi, investasi, dan pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Kegiatan Operasional**

Semua transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam Laporan laba rugi dikelompokkan ke dalam golongan ini. Demikian juga arus kas masuk lainnya yang berasal dari kegiatan operasional, misalnya:

1. Penerimaan dari pelanggan;
2. Penerimaan dari piutang bunga;
3. Penerimaan dividen;
4. Penerimaan refill dari supplier.

Arus kas keluar misalnya berasal dari:

1. Kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual;
2. Bunga yang dibayar atas utang perusahaan;
3. Pembayaran pajak penghasilan;
4. Pembayaran gaji.

b. **Kegiatan Investasi**

Di sini dikelompokkan transaksi kas yang berhubungan dengan perolehan fasilitas investasi dan nonkas lainnya yang digunakan oleh perusahaan. Arus kas masuk terjadi jika kas diterima dari hasil atau pengembalian investasi yang dilakukan sebelumnya.

Arus kas masuk misalnya dari:

1. Penjualan aktiva tetap;
2. Penjualan surat berharga yang berupa investasi;
3. Penagihan pinjaman jangka panjang (tidak termasuk bunga jika merupakan kegiatan investasi);
4. Penjualan aktiva lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi (tidak termasuk persediaan).

Arus kas keluar misalnya dari:

1. Pembayaran untuk mendapatkan aktiva tetap;
2. Pembelian investasi jangka panjang;
3. Pemberian pinjaman pada pihak lain;
4. Pembayaran untuk aktiva lain yang digunakan dalam kegiatan produktifsepti
   hak paten (tidak termasuk persediaan yang merupakan persediaan
   operasional).

c. Kegiatan Pembiayaan

Kelompok ini menyangkut bagaimana kegiatan kas diperoleh untuk
membiayai perusahaan termasuk operasinya. Dalam kategori ini arus kas masuk
merupakan kegiatan mendapatkan dana untuk kepentingan perusahaan. Arus kas
keluar adalah pembayaran kembali kepada pemilik dan kreditur atas dana yang
diberikan sebelumnya.

Arus kas masuk misalnya adalah
1. Pengeluaran saham;
2. Pengeluaran wesel;
3. Pengeluaran obligasi;
4. Pengeluaran hipotek, dan lain-lain.

Arus kas keluar misalnya dari
1. Pembayaran dividend dan pembagian lainnya yang diberikan kepada pemilik;
2. Pembelian saham pemilik kembali (treasury stock);
3. Pembayaran utang pokok dana yang dipinjam (tidak termasuk bunga karena
dianggap sebagai kegiatan operasi);

Kegiatan Investasi dan Pembiayaan Nonkas

Di sini dikategorikan kegiatan investasi dan pembiayaan yang tidak
menggunakan kas. Misalnya pembelian aktiva dengan mengeluarkan surat
berharga, transaksi ini harus dilaporkan tersendiri di bawah kelompok ini.

D. Penyajian Laporan Arus Kas

Untuk menyajikan Laporan Arus Kas dapat digunakan dua metode yaitu :

1. Direct Method

Dalam metode ini pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan
kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan
operasi secara lengkap (gross) dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan.

2. **Indirect Method**

Dalam *indirect method* penyajianannya dimulai dari laba rugi bersih dan selanjutnya disesuaikan dengan menambah atau mengurangi perubahan dalam pos-pos yang mempengaruhi kegiatan operasional seperti penyusutan, naik turun pos aktiva dan utang lancar.

5. **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Biasanya hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

1) Kebijakan akuntansi, misalnya metode laporan konsolidasi, metode penyusutan, persediaan barang, pengakuan hasil, perubahan akuntansi, dan sebagainya.

2) Penjelasan tentang perkara di pengadilan jika ada, kewajiban kontingensi, laba rugi kontingensi, dan komitmen yang tidak biasa.

3) Rencana penggabungan usaha, penjelasan transaksi yang tidak biasa, *related party transactions* (hubungan istimewa) dengan perusahaan anak, induk, direksi, pemegang saham, dan lain-lain.

4) Penjelasan tentang jenis saham, program pemberian saham kepada pegawai, dividen saham, dan sebagainya.

5) Jumlah penyusutan dan biaya riset dan pengembangan.

6) Penjelasan pos penting seperti: umur piutang, perincian persediaan, aktiva tetap, penjualan, pembelian barang, daftar biaya produksi, dan lain sebagainya.

7) Penghasilan tentang pajak penghasilan, komposisi, restitusi, perkara di majelis perpajakan.

Catatan atas laporan keuangan sendiri didefinisikan oleh Kieso dan Weygandt (2007:1145) sebagai berikut:
“Notes are the accountant’s means of amplifying or explaining the items represented in the main body of the statement.”

Sedangkan kamus akuntansi (2005:187) menyebutkan bahwa

“Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan terhadap laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan keuangan pokok, dan disajikan dengan maksud agar laporan keuangan tidak menyesatkan.”

2.1.6 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Dalam uraian diatas telah dikemukakan bermacam-macam kegunaan dari laporan keuangan, akan tetapi laporan keuangan ini juga tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, menurut PAI yang dikutip Harahap (2002,10) sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Laporan keuangan yang bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

b. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.

c. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.

d. Akuntansi biaya melaporkan informasi yang materil. Demikian pula, penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan, jika hal itu tidak memungkinkan pengaruh yang materil terhadap kelayakan laporan keuangan.

e. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam mengambil kepastian; bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau aktiva yang paling kecil.

f. Laporan keuangan telah menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi yang daripada bentuk hukumnya (formalitas).(substance over form).

g. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.

h. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan.

i. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.
Trueblood Committee, seperti yang dikutip Harahap (2002,10), mengajukan beberapa kritik terhadap akuntansi konvensional sebagai berikut:

a. Akuntansi hanya menyangkut laporan masa lalu, tidak dapat menggambarkan secara eksplisit prospek masa depan.
b. Angka-angka akuntansi umumnya didasarkan pada hasil transaksi pertukaran sehingga hanya menggambarkan nilai pada saat itu.
c. Dalam akuntansi sering menggunakan metode yang berbeda yang sama-sama diterima.
d. Akuntansi menekankan pada laporan keuangan yang bersifat umum yang dapat digunakan semua pihak, sehingga terpaksa selalu memperhatikan semua pihak pemakainya yang sebenarnya mempunyai perbedaan kepentingan.
e. Angka-angka di suatu laporan berkaitan dengan angka-angka di laporan lainya.
f. Diakui bahwa laporan keuangan sekarang tidak menggambarkan likuiditas dan arus kas.
g. Perubahan dalam tenaga beli uang jelas ada, akan tetapi hal ini tidak tergambar dalam laporan keuangan.

2.2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance

Isu Good Corporate Governance telah berkembang beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan kemunduran ekonomi Indonesia yang diikuti kebangkrutan banyak perusahaan. Penutupan perusahaan-perusahaan ini, selain karena keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan tetapi juga disebabkan buruknya pengelolaan perusahaan; tidak dijalankannya praktik-praktik Good Corporate Governance.

Adapun Corporate Governance sendiri pertama kali didefinisikan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury report. Perkembangan konsep Corporate Governance sesungguhnya telah dimulai sebelum isu corporate governance menjadi kosa kata paling hangat di kalangan eksekutif bisnis. Bersama dengan dikembangkannya sistem korporasi di Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat satu setengah abad lalu (1840an), isu Corporate Governance telah muncul ke permukaan, meskipun baru berupa
saran dan anekdot. Saat itu berbagai definisi dikemukakan, misalnya oleh Cadbury Committee yang mendefinisikan corporate governance sebagai:

“A set rules that define the relationship between shareholder, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.”

Menurut Organization for Economic Corporation and Development (OECD), mendefinisikan Corporate Governance sebagai berikut:

“Good Corporate Governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Corporate Governance mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholder non-pemegang saham”

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan Corporate Governance sebagai:

“...seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).”

Sedangkan berdasarkan KEPMEN-117/2002 pasal 1 disebutkan bahwa pengertian Good Corporate Governance adalah

“Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan perundangan dan nilai-nilai etika.”

Berdasarkan pengertian Good Corporate Governance di atas pada prinsipnya memiliki kesamaan makna mengatur hubungan antara stakeholder yang berkepentingan dengan perusahaan yang diwujudkan suatu sistem pengendalian perusahaan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan komisaris, Direksi, RUPS, dan para stakeholder lainnya.

b. Suatu sistem check and balance mencakup kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya peluang pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan.

c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

2.2.2 Sejarah Good Corporate Governance

Konsep Corporate Governance yang komprehensif mulai berkembang sejak kejadian “The New York Stock Exchange Crash” pada 19 oktober 1987, dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat dalam bursa efek New York mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Di kala itu, untuk mengantisipasi permasalahan internal perusahaan, banyak para eksekutif yang melakukan rekayasa keuangan yang intinya bagaimana menyembunyikan kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan, yang dilakukan tidak hanya window dressing tetapi juga financial engineering.

Lazimnya pada situasi bisnis kondusif penyimpangan kelakuan baik oleh oknum maupun secara kolektif dalam perusahaan sangat kabur, namun pada saat kesulitan, mulailah terbuka segala macam sumber-sumber penyimpangan (irregularities) dan penyebab kerugian dan kejatuhan perusahaan mulai dari kelakuan profiteering, commercial crime, hingga economic crime.

Dalam kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa, oleh segenap negarawan, cendekiawan dan usahawan; dimulailah gerakan untuk meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam mengelola perusahaan. Gerakan ini dimulai oleh tokoh-tokoh inggris yang saat itu dipimpin oleh Sir Adrian Cadbury, yang saat itu sebagai Direktur Bank Of England dan mantan CEO grup Cadbury. Sejak terbitnya Cadbury Code on Corporate Governance pada tahun 1992, semakin banyak institusi yang telah melakukan penyempurnaan pada prinsip-prinsip dan petunjuk teknik praktik Good Corporate Governance, antara
lain ICGN (International Corporate Governance Network) yang mendorong OECD mengeluarkan OECD Principles on Corporate Governance. Di Indonesia juga telah berdiri organisasi-organisasi yang memfokuskan diri pada masalah pelaksanaan Good Corporate Governance di Indonesia, yaitu Forum for Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional kebijakan Corporate Governance Indonesia, dan terakhir Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Di samping badan-badan tersebut, juga terdapat organisasi yang peduli masalah GCG di Indonesia, seperti Ikatan Akuntansi Indonesia, Bursa Efek Jakarta, dan Bappemam, sebagai institusi yang berhubungan langsung dengan implementasi GCG.

2.2.3 Prinsip–Prinsip Good Corporate Governance

Penerapan Good Corporate Governance dimaksudkan untuk menghindari sistem politik dan hak-hak, dan lebih mengacu kepada manajemen ekonomi suatu Negara, sumber-sumber sosial untuk pembangunan, dan kebutuhan untuk kerangka kerja aturan dan institusi yang dapat diperhitungkan dengan secara jelas. Adapun prinsip Good Corporate Governance berdasarkan KEPMEN-117/2002 adalah

1. Transparansi (transparency)

Transparansi, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini sangat penting bagi pemegang saham dan merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (stakeholders).

A. Hal-hal yang seharusnya diungkapkan:

a. Hasil operasi dan keuangan perusahaan (financial and operating result).

Laporan keuangan yang sudah di audit adalah sumber informasi dalam memonitor kinerja keuangan dan meletakkan dasar bagi penelitian asset securitas. Diskusi manajemen dan analisis operasi kadang juga
menyertai laporan keuangan. Pengungkapan hal-hal diatas akan bermanfaat bagi investor.

b. Tujuan perusahaan.

Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada lingkungan bisnis dan masyarakat umum. Informasi ini mungkin penting bagi investor dan pengguna lainnya untuk mengevaluasi hubungan perusahaan dengan komunitas tempat mereka beroperasi dan langkah-langkah yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya.

c. Kepemilikan Saham.

Salah satu hak investor adalah mendapatkan informasi struktur kepemilikan perusahaan hingga hak-hak pemilik perusahaan. pengungkapan yang diperlukan adalah data pemegang saham mayoritas, hak-hak voting khusus, persetujuan pemegang saham dan lain-lain.

d. Angota Dewan Eksekutif dan gaji mereka.

Pasar membutuhkan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja dan kualifikasi anggota dewan serta mengukur berapa besar potensi konflik kepentingan akan mempengaruhi keputusan mereka. Pengungkapan gaji dewan eksekutif adalah untuk mengukur biaya dan manfaat dari rencana gaji tersebut, serta kontribusi apa yang didapat dari tunjangan seperti stock option bagi kinerja dewan.

e. Faktor-faktor resiko yang dapat diperkirakan dan material.

Informasi mengenai hal ini misalnya resiko yang timbul dari wilayah geografis, ketergantungan atas komoditas tertentu, resiko tingkat suku bunga, resiko transaksi derivative dan transaksi off balance sheet dan resiko kerusakan lingkungan hidup.

f. Isu-isu material yang berkrena dengan kepegawaian dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

g. Struktur pengendalian dan kebijakan pengelolaan perusahaan.

h. Setiap informasi (keuangan atau non-keuangan) yang akan diungkapkan harus diaudit terlebih dulu agar informasi mempunyai kualitas yang tinggi.
i. Audit tahunan harus dilaksanakan auditor independen untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pihak eksternal.

j. Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya, agar informasi tersebut relevan.

2. Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Pengalaman selama ini banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama yang berbentuk tertutup ketidakjelasan fungsi dalam pengelolaan perusahaan, misalnya siapa yang diawasi dan siapa yang mengawasi. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat.

Kerangka kerja GCG memastikan sistem pengendalian strategis dan monitoring berjalan dengan baik serta memastikan akuntabilitas dewan eksekutif pada perusahaan, pemegang saham dan stakeholder. Dewan bertanggung jawab untuk memantau kinerja dan pencapaian target bagi pemegang saham, sekaligus mencegah berlarutnya konflik kepentingan serta menjaga kompetensi yang adil dalam dalam perusahaan. agar akuntabilitas terwujudnya dengan baik dan efektif, dewan harus menjaga indepensi manajemen. Tanggung jawab dewan yang lain yang lain adalah memastikan ditaatinya hukum, pajak, etika, dan lain-lain.untuk itu anggota dewan harus berlaku, sebagai berikut:

a. Anggota dewan harus bertindak didasari informasi yang lengkap.

b. Bila keputusan dewan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda di antara pemegang saham, dewan harus memuaskan keluhan-keluhan pemegang saham.

c. Dewan harus menjamin ketaatan pada hukum yang diterapkan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham.
3. **Pertanggungjawaban (responsibilities)**

Pertanggungjawaban, adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau stakeholder dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis, serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat. Oleh karena itu setiap perusahaan harus menyadari bahwa beralasinya perusahaan tidak dapat dengan sendiri tanpa adanya dukungan dan kerjasama aktif dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

4. **Kemandirian (independency)**

Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak akan ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif. Selama ini dalam praktik di Indonesia, prinsip ini kurang didukung oleh regulasi yang ada, sehingga pengaruh pemegang saham terhadap pengelola atau agen perusahaan sangat besar, terkadang Direksi tidak dapat memiliki kekuatan untuk melawan pengaruh internal dan eksternal dalam membuat keputusan. Untuk itu, dalam meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan seharusnya seharusnya mengembangkan aturan atau pedoman yang jelas dan tegas tentang bagaimana ekstensi organ-organ perusahaan terutama Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham menjalankan roda perusahaan.

5. **Kewajaran (fairness)**

Kesetaraan dan kewajaran yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta
perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan minoritas, pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan dari perbuatan buruk orang dalam, self-dealing, dan konflik kepentingan, kemudian menerapkan bagaimana peran dan tanggung jawab organ perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan sebagainya. Dengan adanya aturan main yang jelas, maka pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

Keadilan dapat diwujudkan dengan cara:
1. Kesetaraan dalam pemuasan keluhan
2. Kesamaan dalam memperoleh informasi tentang perusahaan.
3. Pelarangan insider trading serta kolusi, korupsi, dan nepotisme.

2.2.4 Aspek–aspek Good Corporate Governance

I Putu Ari Suta, seperti yang dikutip www.jsx.com, menyatakan bahwa penerapan Corporate Governance membutuhkan perhatian dari jajaran atas perusahaan dan harus menjadi bagian dari rencana usaha dan rencana pengendalian.

Ada beberapa aspek penting dari Corporate Governance:
1. Menajemen harus accountable di hadapan pemegang saham. Direksi dan komisaris bertanggung jawab terhadap pemodal atas hasil operasi dan hasil keuangan perusahaan. Undang-undang PERSEROan harus mengakomodir hal ini.
4. Seorang professional yang independen harus melakukan audit terhadap keuangan perusahaan dan sebuah komite pengawasan tingkat tinggi harus mengawasi sistem akuntansi dan pengendalian perusahaan.

Sedangkan menurut Emirzon (2007:95) terdapat beberapa aspek penting dari GCG yang perlu dipahami beragam kalangan bisnis, yaitu :

1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ tersebut.

2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan stakeholder. Diantaranya, tanggung jawab pengelola perusahaan, manajemen, pengawasan, serta penanggungjawaban kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya.

3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perubahan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhan.

4. Adanya perilaku yang sama terhadap pemegang saham, teutama pemegang saham minoritas melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bias menguntungkan orang dalam. (insider information for insider trading)

2.2.5 Tujuan Good Corporate Governance

Berdasarkan berbagai definsi atau pengertian GCG yang disampaikan dapat diketahui ada lima macam tujuan utama Good Corporate Governance, yaitu :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Director dan manajemen perusahaan
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Director dengan manajemen senior perusahaan

Sedangkan berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa penerapan Good Corporate Governance pada BUMN bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien serta membeberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
3. Mendorong agar organ dalam pembuatan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
5. Mensuskeskan program privatisasi.

2.2.6 Manfaat Good Corporate Governance

Corporate Governance sebagai suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dikelola dan diawasi, pelaksanaan Corporate Governance yang baik membawa banyak manfaat dari penerapannya. Berikut ini beberapa pendapat dari berbagai sumber:

1. Menurut David Melvill, presiden Chartered Institute of Management Accountant, ada beberapa keuntungan dari penerapan GCG, antara lain: mengurangi resiko, membantu menjamin kepatuhan dengan peraturan yang ada, meningkatkan kepemimpinan di dalam perusahaan, memacu kinerja, membantu perusahaan dalam upaya go public, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham, dan akuntabilitas sosial akan terungkap jelas.
2. Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal yang dikutip oleh Emirzon (2007:66) berpendapat bahwa manfaat penerapan GCG, sebagai berikut:
   a. Perbaikan dalam komunikasi; dalam posisi yang sejajar antara pemegang saham mayoritas, minoritas, dan asing serta stakeholder yang berkepentingan lain, akan tumbuh komunikasi yang baik dan saling membutuhkan.
   b. Minimalisasi potensi benturan
   c. Fokus Perbaikan dan komunikasi
   d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
   e. Promosi citra korporat
   f. Peningkatan kepuasan pelanggan
   g. Perolehan kepercayaan investor

3. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia, dalam www.fegi.co.id mengungkapkan kegunaan GCG, sebagai berikut:
   a. Biaya modal yang lebih rendah
   b. Lebih mudah memperoleh modal
   c. Mempertahankan kinerja usaha
   d. Mempengaruhi harga saham
   e. Mempertahankan kinerja ekonomi

   Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan beberapa manfaat Good Corporate Governance, antara lain:
   1. Entitas bisnis akan menjadi lebih efisien
   2. Meningkatkan kepercayaan publik
   3. Menjaga going concern perusahaan
   4. Dapat mengukur target kinerja perusahaan
   5. Meningkatkan produktivitas
   6. Mengurangi distorsi (management risk)
   7. Meningkatkan harga saham
   8. Mengurangi cost of capital
   9. Meningkatkan corporate image
Akan tetapi terdapat perbedaan manfaat yang dicapai masing-masing perusahaan, sebagaimana dijelaskan oleh Hon. Justice Owen (Commissioner of Australian Royal Commission). Dalam paragraf laporan beliau tentang hasil analisis kejatuhan HIH Insurance Company Ltd, seperti yang dikutip Emirzon (2003:67) yaitu:

“by its very nature corporate governances is not something where one size first all, even with companies within a class, such as public company, their capital base, risk profile, corporate history, business activity and management and personel arrangement will be varied. It would be impracticable and undersirable to attempt to place them all within a single straitkacket and process. A degree of flexibility and acceptance that system can and should be modified to suit the particular attribute and needs of each company is necessary if the objectives of improved corporate governance are to be achieve.”

Hon. Justice Owen memberikan makna bahwa optimalisasi GCG setiap perusahaan tidak sama, karena adanya perbedaan faktor intern, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis perusahaan, jenis resiko bisnis, struktur permodalan dan manajemen. Oleh karena itu, untuk mencapai manfaat yang optimal dari penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance harus dimodifikasi prinsi-prinsip GCG dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana optimalisasi manfaat penerapan GCG.
2.3 Manfaat Kualitas Laporan Keuangan Dalam Kaitannya Dengan Good Corporate Governance

![Diagram of Transparansi, Akuntabilitas, Kemandirian, Pertanggung jawaban, Kewajaran, and Good Corporate Governance]

2.3.1 Transparansi

Laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, merupakan bentuk laporan yang dikeluarkan manajemen mengenai posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu, kinerja perusahaan, dan arus kas selama periode tertentu. Laporan keuangan menggambarkan operasional perusahaan yang dijabarkan dalam bentuk satuan uang untuk periode yang telah dilalui atau dengan kata lain periode sebelumnya. Dalam laporan keuangan, manajemen mempertanggungjawabkan sumber-sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka, dalam hal ini manajemen mempertanggungjawabkan kepada RUPS. RUPS sendiri merupakan suatu kapasitas untuk memanggil manajemen.

Dalam hal ini, RUPS berhak memperoleh informasi tentang laporan keuangan dari direksi Perseroan. Laporan keuangan merupakan petunjuk strategis bagi perusahaan, dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, kebutuhan tentang peramalan di masa datang, dan evaluasi masa lalu. Laporan keuangan
juga merupakan sarana pemantauan yang efektif atas manajemen; dengan laporan keuangan terlihat bagaimana menajemen mengelola sumber-sumber daya yang diperdayakan kepadanya, sehingga kegiatan manajemen dapat dipantau.

Dalam www.jsx.com dijelaskan bahwa beberapa hal penting menyangkut Corporate Governance dalam kaitannya dengan pasar modal yang berhubungan dengan transparansi antara lain:

“Pengalaman pasar modal yang telah mapan menunjukkan bahwa perusahaan publik harus terbuka dan accountable dalam memelihara kepercayaan pemodal publik. Hal ini menuntut transparansi dan disclosure dalam pengambilan keputusan perusahaan. Penerapan GCG diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan calon investor dan mitra usaha lainnya.”

Menyangkut transparansi dalam memelihara kepercayaan publik adalah akuntabilitas laporan keuangan, sebab laporan keuanganlah yang dikomunikasikan kepada pemodal publik.

Pengumuman laporan keuangan merupakan pemenuhan prinsip GCG, dengan adanya pengumuman atau pembuatan laporan keuangan tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan telah memenuhi salah satu hak dasar pemegang saham, yaitu hak menerima informasi. Pentingnya menyampaikan laporan keuangan kepada publik di dalam kerangka Good Corporate Governance dapat dilihat dari kalimat berikut ini:

”The annual audit is one of the cornerstones of corporate governance. given the separation of ownership from management, the directors are required to report on their stewardship by means of the annual report and financial statements sent to shareholders. The audit provides an external and objective check on the way in which the financial statements have been prepared and presented, and it is an essential part of the checks and balances required. The question is not whether there should be an audit, but how to ensure its objectivity and effectiveness. Audits are reassurance to all who have a financial interest in companies, quite apart from their value to boards of directors. The most direct method of ensuring that companies are accountable for their actions is through open disclosure by boards and through audits carried out against strict accounting standards.”
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa laporan keuangan merupakan salah satu pedoman bagi stakeholders untuk dapat mengetahui kinerja dari sebuah perusahaan.

2.3.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh KNKCGI, adapun hubungan antara kualitas laporan keuangan dengan GCG, tampak jelas dari karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai usaha untuk mewujudkan Good Corporate Governance itu sendiri. Good Corporate Governance tidak akan terwujud apabila laporan keuangan yang merupakan aspek penting yang mengkomunikasikan manajemen perusahaan dengan para stakeholders, tidak diterima atau dengan kata lain tidak akuntabel.

Manajer bertanggung jawab kepada pemodal perusahaan, dimana pemodal ini menginvestasikan dananya kepada perusahaan, sehingga mereka ingin mengetahui bagaimana penggunaan sumber-sumber ekonomi yang telah diinvestasikan tersebut. Dari sinilah dimulai suatu bentuk akuntabilitas, yaitu bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Berdasarkan hal ini, pemodal data mengevaluasi kinerja perusahaan yang dijalankan oleh manajemen (steward). Pihak di luar perusahaan yang tidak mengetahui seluk beluk operasional perusahaan, menggantungkan keputusan yang akan diambil, serta untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana yang dipercayakan, kepada laporan yang dikeluarkan manajemen.

Standar Akuntansi Keuangan Bab Kerangka Dasar dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 14, menyatakan:

“Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.”
Berdasarkan penjelasan teori-teori diatas, jelaslah bahwa laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas manajemen perusahaan terhadap stockholders atas sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Akuntabilitas laporan keuangan merupakan pemenuhan dari prinsip GCG yang dikeluarkan dari ADB tahun 1998, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akuntabilitas merupakan kapasitas untuk memanggil manajemen untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya. Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban finansial, dimana manajemen mempertanggungjawabkannya dalam RUPS.

I Putu Ary Suta, dalam www.jsx.com memberi pernyataan mengenai aspek penting dari Corporate Governance yang menyangkut akuntabilitas laporan keuangan yaitu aspek pertama manajemen harus accountable di hadapan pemegang saham. Direksi dan komisaris bertanggungjawab atas hasil operasi dan hasil keuangan perusahaan.

UUPT No. 1/1995 tidak mengakomodir hal ini karena dalam pasal 82 diatur bahwa :

“Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan tujuan.”

Di lain pihak, pasal 97 UUPT mengatur :

“Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi.”

Berdasarkan UUPT ini, direksi yang bertanggungjawab atas hasil operasi dan hasil keuangan perusahaan yang dipertanggungjawabkan dalam RUPS. Laporan keuangan merupakan hasil operasi dan hasil keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham, dalam hal ini harus accountable.
2.3.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban, adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau stakeholders dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis, serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat. Salah satu alat untuk memenuhi prinsip pertanggungjawaban itu adalah dengan menerbitkan laporan keuangan.

Kewajiban untuk menginformasikan laporan keuangan tidak dapat dilakukan secara sembarang, tetapi juga harus dilakukan secara profesional dengan cara menunjuk auditor yang independent, qualified, dan competent. Auditor tersebut juga tidak membuat laporan keuangan secara sembarang, tetapi harus mengikuti pedoman yang telah ada. Di dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 dijelaskan bahwa penyajian laporan keuangan harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di pasar modal.

Penunjukan auditor juga tidak dapat dilakukan secara asal, tetapi harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini dapat dimengerti karena auditor merupakan suatu subjek yang ditunjuk untuk membuat laporan keuangan yang bahkan digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan, oleh karena itu auditor yang ditunjuk haruslah auditor yang independent, qualified, dan competent. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibuat peraturan oleh Bapepam, yaitu Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.2 yang pada intinya mengatakan bahwa dalam memberikan jasa professional, akuntan wajib senantiasa mempertahankan sikap independen.

Merupakan tugas direksi dari sebuah perusahaan untuk dapat menunjuk auditor yang independent, qualified, dan competent. Hal tersebut dapat kita lihat dalam salah satu penjabaran prinsip Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh OECD, yang menyatakan bahwa:
2.3.4. Kemandirian

Seperti diungkapkan sebelumnya, laporan keuangan mempunyai hubungan dengan Good Corporate Governance, dimana laporan keuangan merupakan sarana untuk mencapai suatu tata kelola perusahaan yang baik. Good Corporate Governance tidak akan terwujud apabila laporan keuangan yang merupakan aspek penting di dalam mengkomunikasikan manajemen perusahaan dengan para stakeholders tidak tersedia.

Salah satu tujuan dari dibuatnya laporan keuangan perusahaan adalah untuk membantu perusahaan di dalam pengambilan keputusan. Trueblood Committee, seperti yang dikutip Harahap (2002) merumuskan tujuan laporan keuangan, sebagai berikut:

“Memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.”

Dengan tersedianya laporan keuangan, setiap keputusan yang akan diambil dipertimbangkan sesuai dengan kondisi perusahaan misalnya dengan melakukan peramalan untuk masa datang atau dengan evaluasi masa lalu, sehingga setiap keputusan atau kebijakan yang diambil akan bertujuan untuk kepentingan atau kemajuan perusahaan, artinya setiap keputusan diambil sesuai fakta dan realita yang ada, sehingga di dalam pengambilan keputusan akan bebas dari intervensi pihak manapun. Dengan kata lain prinsip kemandirian yang menekankan dalam hal pengambilan keputusan tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif akan tercapai.
2.3.5. Kewajiban

Dengan adanya laporan keuangan membantu para stakeholder untuk mengetahui gambaran perusahaan, khususnya para pemegang saham yang telah menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Bagi para pemegang saham, kepentingan mendasar selain mendapat keuntungan adalah mendapat perlakuan dan perlindungan yang seimbang dari perusahaan, baik pemegang saham mayoritas atau minoritas, maupun asing atau domestik. Perlindungan dan persamaan ini terutama diperlukan oleh pemegang saham minoritas, mengingat kenyataan bahwa kedudukan pemegang saham minoritas seringkali berada dalam posisi yang lemah. Kepentingan ini dipenuhi melalui implementasi prinsip GCG yang dinyatakan OECD yaitu *Fairness* yang menyatakan keharusan bagi sebuah perusahaan untuk memberikan kedudukan yang sama terhadap pemegang saham, sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin. OECD mengungkapkan bahwa pemegang saham harus dipenuhi hak-haknya, salah satunya adalah

“*Hak untuk memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu dan teratur, dan hak ini harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa ada pembedaan atas klasifikasi saham yang dimiliki olehnya*”

Salah satu informasi yang dibutuhkan para *stakeholders* terdapat pada laporan keuangan, dimana salah satu ciri laporan yang berkualitas adalah relevan, yaitu laporan keuangan harus memuat informasi yang dipandang material bagi perusahaan, hal ini diungkapkan pada Standar Akuntansi Keuangan Bab Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yaitu

“*Relevansi informasi dipengaruhi oleh tingkat nilai materialitasnya. Tingkat materialitas diukur dari seberapa jauh nilai itu akan berpengaruh pada keputusan para pemakai.*”

Untuk mendukung ketepatan waktu dan teratur, laporan keuangan khususnya bagi perusahaan publik selain harus diterbitkan setiap tahun buku terakhir, juga pada praktiknya diterbitkan setiap tiga bulan, dalam hal ini
merupakan laporan keuangan interim. PSAK No.3 tentang Laporan Keuangan Interim paragraf 2, memberikan definisi laporan keuangan interim sebagai berikut:

“Laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan.”

Dengan kata lain dengan laporan keuangan yang berkualitas dapat mewujudkan prinsip Good Corporate Governance yaitu kewajaran.